



Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Batu Merah Kota Ambon

Muhtar¹, Atikah Khairunnisa², Rukoyah³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: muhtar@lecturer.unpatti.ac.id

Diterima: 09-05-2026 | Disetujui: 16-05-2026 | Diterbitkan: 18-05-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the digital transformation in the administration of Negeri Batu Merah Government in Ambon City, identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of government digitalization, and examine its impact on the quality of public services. The study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques consisting of observation, interviews, and documentation. The research informants included village government officials, administrative staff, and community members as users of public services. The findings indicate that digital transformation in Negeri Batu Merah has been implemented through computer-based administration, digital archiving, and the utilization of digital communication media in public services. The implementation of government digitalization has positively impacted the effectiveness of administrative services, accelerated the dissemination of public information, and improved the efficiency of government officials' performance. However, the implementation of digital transformation still faces several challenges, including limited information technology infrastructure, low capacity of human resources among government officials, budget constraints, and limited digital literacy within the community. This study concludes that digital transformation plays an important role in creating a more modern, effective, transparent, and responsive local governance system that meets community needs

Keywords: digital transformation; local governance; public service; e-government; governance system.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kota Ambon, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi digitalisasi pemerintahan, serta mengetahui dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparat pemerintahan negeri, staf administrasi, dan masyarakat pengguna layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Negeri Batu Merah telah diterapkan melalui penggunaan administrasi berbasis komputer, pengarsipan digital, serta pemanfaatan media komunikasi digital dalam pelayanan publik. Implementasi digitalisasi pemerintahan memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan administrasi, percepatan penyampaian informasi publik, dan peningkatan efisiensi kerja aparatur pemerintahan. Namun demikian, pelaksanaan transformasi digital masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur, keterbatasan anggaran, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan negeri yang lebih modern, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Katakunci: transformasi digital; pemerintahan negeri; pelayanan publik; e-government; tata kelola pemerintahan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhtar, Khairunnisa, A. ., & Rukoyah, R. (2026). Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Batu Merah Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1472-1481.
<https://doi.org/10.63822/2bjvhe74>

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk mengubah sistem pelayanan konvensional menuju pelayanan berbasis digital yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan lokal, digitalisasi pemerintahan desa atau negeri menjadi penting karena desa merupakan unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang berhubungan langsung dengan kebutuhan administrasi publik sehari-hari. Implementasi digital governance pada tingkat desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Setiawan & Sulistyono, 2021).

Pemerintah Indonesia sendiri telah mendorong percepatan transformasi digital melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa seluruh instansi pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, perlu mengintegrasikan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Digitalisasi pemerintahan desa juga sejalan dengan konsep *good governance* yang menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Pratama, 2020).

Di Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon, upaya transformasi digital pada pemerintahan negeri masih menghadapi berbagai tantangan. Negeri Batu Merah sebagai salah satu wilayah pemerintahan adat dan administratif di Kecamatan Sirimau memiliki dinamika pemerintahan yang kompleks karena tingginya jumlah penduduk, heterogenitas masyarakat, serta kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat. Kondisi tersebut menuntut adanya inovasi pelayanan pemerintahan berbasis digital agar proses administrasi pemerintahan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, implementasi digitalisasi pemerintahan negeri di Batu Merah belum sepenuhnya optimal. Permasalahan yang sering muncul meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan, kurangnya integrasi sistem pelayanan digital, serta minimnya literasi digital masyarakat. Selain itu, sebagian besar pelayanan administrasi masih dilakukan secara manual sehingga menyebabkan lambatnya proses pelayanan dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan tatap muka. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital pada pemerintahan negeri masih membutuhkan penguatan dari berbagai aspek kelembagaan maupun teknis.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan desa memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Widodo (2022) menemukan bahwa implementasi *e-government* di tingkat desa mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi masyarakat melalui sistem pelayanan berbasis aplikasi digital. Penelitian lain oleh Rahmawati et al. (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan komitmen pemerintah desa. Sementara itu, penelitian Putri dan Haryanto (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik di desa dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pemerintahan desa di wilayah perkotaan maju atau daerah yang telah memiliki infrastruktur digital

memadai. Penelitian mengenai transformasi digital pada pemerintahan negeri berbasis adat di wilayah Maluku, khususnya Negeri Batu Merah Kota Ambon, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik pemerintahan negeri di Maluku memiliki sistem sosial dan budaya yang berbeda dengan desa administratif pada umumnya sehingga memerlukan pendekatan tersendiri dalam implementasi digital governance. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji transformasi digital pemerintahan negeri pada konteks pemerintahan adat di Kota Ambon.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kota Ambon?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah?
3. Bagaimana pengaruh transformasi digital terhadap kualitas pelayanan publik di Negeri Batu Merah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kota Ambon, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi digitalisasi pemerintahan, serta mengetahui dampak transformasi digital terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pemerintahan digital pada tingkat desa atau negeri, serta menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kota Ambon, termasuk berbagai dinamika, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam implementasi digitalisasi pelayanan pemerintahan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan digital governance pada pemerintahan negeri.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Negeri Batu Merah merupakan salah satu wilayah pemerintahan negeri dengan jumlah penduduk yang besar dan aktivitas pelayanan publik yang cukup kompleks di Kota Ambon, sehingga menjadi relevan untuk mengkaji penerapan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan penelitian yang terdiri atas aparat pemerintahan negeri, staf administrasi pelayanan publik, tokoh masyarakat, serta masyarakat pengguna layanan pemerintahan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan digital di Negeri Batu Merah.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen

resmi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, laporan pelayanan publik, arsip administrasi, jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema transformasi digital pemerintahan desa atau negeri. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen penelitian sebelumnya mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah sebagai bahan pendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan administrasi dan penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai implementasi digitalisasi pemerintahan serta kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan publik. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti profil negeri, struktur organisasi pemerintahan, arsip pelayanan administrasi, serta data penggunaan sistem pelayanan berbasis digital.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), sedangkan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, alat perekam suara, kamera dokumentasi, dan catatan lapangan. Peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data penelitian sehingga diperlukan kemampuan analisis yang objektif dan sistematis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara dan observasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data secara sistematis berdasarkan temuan-temuan penelitian di lapangan.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan penelitian, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan informan sebelum wawancara dilakukan, serta menggunakan data penelitian hanya untuk kepentingan akademik dan ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Transformasi Digital Pemerintahan Negeri Batu Merah

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan. Pemerintah Negeri Batu Merah mulai menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi masyarakat melalui penggunaan komputerisasi administrasi, media komunikasi digital, serta pemanfaatan aplikasi pelayanan berbasis internet dalam mendukung aktivitas pemerintahan.

Digitalisasi pelayanan pemerintahan di Negeri Batu Merah dilakukan pada beberapa bidang pelayanan seperti administrasi surat menyurat, pengelolaan data penduduk, pelayanan surat keterangan,

penyampaian informasi publik, dan komunikasi pemerintahan dengan masyarakat melalui media sosial maupun aplikasi pesan digital. Penerapan sistem digital tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan administrasi manual, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Namun demikian, implementasi transformasi digital di Negeri Batu Merah masih berada pada tahap pengembangan. Sebagian pelayanan administrasi masih dilakukan secara manual karena keterbatasan fasilitas teknologi, belum optimalnya integrasi sistem pelayanan digital, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam mengoperasikan teknologi informasi secara maksimal.

2. Implementasi Digitalisasi Pelayanan Publik

Penerapan digitalisasi pelayanan publik di Negeri Batu Merah memberikan dampak positif terhadap proses pelayanan administrasi masyarakat. Penggunaan perangkat komputer dan sistem pengarsipan digital membantu aparatur pemerintahan dalam mempercepat proses pencatatan data administrasi dan penyusunan dokumen pelayanan publik. Selain itu, penggunaan media komunikasi digital seperti WhatsApp dan media sosial juga mempermudah penyampaian informasi pemerintahan kepada masyarakat. Informasi mengenai pelayanan administrasi, kegiatan pemerintahan, dan pengumuman publik dapat disampaikan lebih cepat dibandingkan metode konvensional.

Tabel 1. Bentuk Implementasi Digitalisasi Pemerintahan Negeri Batu Merah

Bentuk Digitalisasi	Implementasi	Dampak
Administrasi digital	Penggunaan komputer dalam pengolahan data	Mempercepat pelayanan administrasi
Media sosial pemerintahan	Penyampaian informasi publik melalui media sosial	Mempermudah komunikasi dengan masyarakat
Arsip digital	Penyimpanan dokumen secara elektronik	Mengurangi risiko kehilangan dokumen
Komunikasi berbasis aplikasi	Pemanfaatan WhatsApp dalam koordinasi pelayanan	Mempercepat respons pelayanan

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat menilai bahwa pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Aparatur pemerintahan juga lebih mudah melakukan pencarian data dan pengelolaan dokumen karena sebagian arsip telah terdigitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negeri. Meskipun demikian, pelayanan digital belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan berbasis teknologi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tetap memilih pelayanan tatap muka secara langsung.

3. Faktor Pendukung Transformasi Digital Pemerintahan Negeri

Keberhasilan implementasi transformasi digital di Negeri Batu Merah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, baik dari aspek kelembagaan maupun sumber daya pemerintahan.

Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya komitmen pemerintah negeri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah negeri menyadari bahwa

digitalisasi pelayanan menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan masyarakat modern yang menuntut pelayanan cepat dan transparan.

Selain itu, dukungan penggunaan perangkat teknologi seperti komputer, jaringan internet, dan telepon pintar turut membantu proses digitalisasi administrasi pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang memiliki kemampuan dasar penggunaan teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan digital.

Tabel 2. Faktor Pendukung Transformasi Digital Pemerintahan

Faktor Pendukung	Keterangan
Komitmen pemerintah negeri	Mendukung modernisasi pelayanan publik
Ketersediaan perangkat teknologi	Tersedianya komputer dan akses internet
Dukungan komunikasi digital	Penggunaan media sosial dan aplikasi pesan
Kesadaran masyarakat	Meningkatnya kebutuhan pelayanan cepat

(Sumber: Hasil Penelitian, 2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran terhadap pentingnya pelayanan digital karena dinilai lebih praktis dan efisien. Hal tersebut menjadi modal sosial penting dalam pengembangan pemerintahan berbasis digital di Negeri Batu Merah.

4. Faktor Penghambat Transformasi Digital Pemerintahan Negeri

Meskipun digitalisasi pemerintahan telah mulai diterapkan, terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi transformasi digital di Negeri Batu Merah. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, terutama terkait kestabilan jaringan internet dan keterbatasan perangkat pelayanan digital. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam bidang teknologi informasi masih belum merata sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan digital yang diberikan kepada masyarakat.

Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, khususnya masyarakat usia lanjut yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan berbasis teknologi. Akibatnya, proses digitalisasi pelayanan belum dapat diterapkan secara menyeluruh.

Tabel 3. Faktor Penghambat Transformasi Digital Pemerintahan

Faktor Penghambat	Dampak
Keterbatasan jaringan internet	Pelayanan digital sering terhambat
Kapasitas SDM aparatur terbatas	Pengoperasian sistem belum optimal
Literasi digital masyarakat rendah	Sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan
Minimnya anggaran digitalisasi	Pengembangan sistem belum maksimal

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2026)

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati et al. (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks Negeri Batu Merah, tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan masyarakat secara menyeluruh.

5. Dampak Transformasi Digital terhadap Pelayanan Publik

Transformasi digital memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Negeri Batu Merah. Pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih mudah, serta transparansi informasi publik mulai meningkat. Selain itu, digitalisasi juga membantu aparatur pemerintahan dalam meningkatkan efisiensi kerja karena pengelolaan data dan dokumen dapat dilakukan secara elektronik. Hal tersebut mengurangi penggunaan dokumen manual dan mempercepat proses pencarian arsip administrasi.

Gambar 1. Alur Transformasi Digital Pelayanan Pemerintahan Negeri Batu Merah



(Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat menilai bahwa pelayanan berbasis digital memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi pemerintahan. Namun demikian, pemerintah negeri masih perlu melakukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, dan edukasi literasi digital kepada masyarakat agar transformasi digital dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah Kota Ambon menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam mendukung modernisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan digitalisasi administrasi melalui penggunaan teknologi informasi, media komunikasi digital, dan pengarsipan elektronik telah membantu mempercepat proses pelayanan administrasi masyarakat, meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintahan, serta memperluas akses informasi publik kepada masyarakat.

Pelaksanaan transformasi digital di Negeri Batu Merah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain adanya komitmen pemerintah negeri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, ketersediaan perangkat teknologi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan praktis. Namun demikian, implementasi digitalisasi pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam penguasaan teknologi informasi, minimnya anggaran pengembangan sistem digital, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik di Negeri Batu Merah. Pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, transparansi informasi pemerintahan meningkat, dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Meskipun demikian, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan infrastruktur teknologi, dan edukasi literasi digital masyarakat masih diperlukan agar implementasi pemerintahan berbasis digital dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan negeri yang modern, responsif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Hardjaloka, L. (2019). Studi penerapan e-government di Indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3), 435–452. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Publisher.
- Kurniawan, T., & Prasetyo, A. G. (2021). Digital governance dalam pelayanan publik di era society 5.0. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 115–128. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i2.89>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyadi, D., & Gedeona, H. T. (2020). Transformasi digital birokrasi pemerintahan desa menuju pelayanan publik berbasis elektronik. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 401–416. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.676>
- Nugroho, R., & Widodo, S. (2022). Implementasi e-government dalam pelayanan administrasi desa berbasis digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 145–158. <https://doi.org/10.24905/jip.v13i2.2211>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pratama, A. B. (2020). The landscape of public service innovation in Indonesia: A comprehensive analysis. *Innovation & Management Review*, 17(1), 25–40. <https://doi.org/10.1108/INMR-11-2018-0080>
- Putri, N. A., & Haryanto, J. T. (2020). Digitalisasi pelayanan publik desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(1), 89–102. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i1.1021>
- Rahmawati, I., Suryadi, & Lestari, D. (2021). Kesiapan pemerintah desa dalam implementasi digital governance. *Jurnal Governance*, 12(2), 201–214. <https://doi.org/10.31506/jog.v12i2.1125>

- Setiawan, D., & Sulistyono, B. (2021). Transformasi digital pemerintahan desa menuju smart village. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 134–147. <https://doi.org/10.25077/jakp.6.2.134-147.2021>
- Sosiawan, E. A. (2015). Tantangan dan hambatan implementasi e-government di Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 19(3), 231–248. <https://doi.org/10.33299/jpkop.19.3.346>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- United Nations. (2022). *E-government survey 2022: The future of digital government*. United Nations Publications. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/un-e-government-survey-2022>
- Yusuf, M., & Kurnia, R. (2023). Inovasi pelayanan publik berbasis digital pada pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 55–67. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.59876>